

Kewarganegaraan Baru dan Pilpres

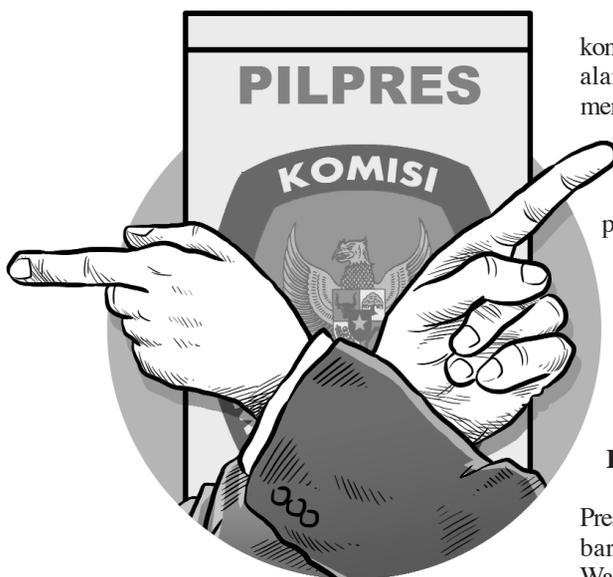
Oleh **Wijayanto**



ADA satu gerakan pemikiran yang kini tengah menjadi arus utama di berbagai belahan dunia selama satu dasawarsa terakhir. Arus pemikiran ini jadi bahan diskusi hangat saat saya menempuh studi master di kota Laramie yang beku di Wyoming, Amerika, sepuluh tahun yang lalu.

Gagasan ini menjadi perdebatan yang riuh di tengah kota Leiden yang sepi dalam perjalanan studi doctoral saya di Belanda, enam tahun terakhir ini. Sesungguhnya, arus pemikiran ini telah mulai menjadi bahan diskusi yang serius di kampus-kampus Indonesia yang berpikiran maju. Jika mesti diringkas, gerakan pemikiran ini terangkum dalam satu kata: *citizenship*.

Meskipun secara bahasa *citizenship* bisa kita artikan sebagai "kewarganegaraan", dalam tulisan ini ia akan saya terjemahkan sebagai "kewarganegaraan baru". Sebab, konsep kewarganegaraan yang diusung konsep ini berbeda 180 derajat dengan konsep kewarganegaraan yang telah diajarkan oleh rezim Order Baru selama puluhan tahun, yang sedikit banyak masih lekat dalam pikiran bawah sadar kita hingga hari ini.



Pokok persoalannya ada pada konsep warga negara yang baik. Konsep warga negara yang baik dalam pikiran rezim tiran itu adalah warga yang sadar akan kewajibannya kepada negara, dan dengan demikian, patuh pada kekuasaan. Sebaliknya, warga negara yang baik dalam kewarganegaraan baru menekankan pentingnya kesadaran warga akan hak-haknya dan berani berjuang untuk mengklaim hak itu, yang

sering kali justru terancam oleh keberadaan negara.

Sebagai satu gerakan keilmuan, teori ini mengubah secara radikal fokus perhatian para ilmuwan politik. Jika dulu studi ilmu politik melalui bicara tentang elite dan lembaga negara yang pada dasarnya adalah tempat elite berada, kewarganegaraan baru lebih memfokuskan perhatian pada orang biasa yang sering terabaikan.

Dia berangkat dari satu premis bahwa stagnasi proses demokratisasi di Asia Tenggara tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan kekurangan institusional atau perilaku egois para elite. Sebaliknya, ada kebutuhan mendesak untuk mempelajari praktik-praktik ini dari bawah dengan mempelajari cara-cara di mana kewarganegaraan diterima dan dipraktikkan oleh orang-orang biasa.

Sebagai satu gerakan politik, teori ini meyakini, sudah bukan saatnya lagi warga negara menggantungkan harapan kepada elite. Ini menentang kebiasaan kita yang selalu mengharapakan elite dan pemimpin untuk menghadirkan perubahan.

Hal ini terangkum jelas dalam konsep Ratu Adil yang masih kuat di alam bawah sadar kita. Sisa-sisa memori alam bawah sadar ini terasa kuat setiap musim pemilu tiba.

Masyarakat tenggelam dalam eskstase mendukung dan memilih pemimpin dan mengharapakan pemimpin baru itu bisa seketika menjadi jalan keluar atas semua masalah bangsa. Namun kemudian mereka kecewa karena pemimpin baru itu tak sepenuhnya mampu mewujudkan semua harapan.

Festival Gagasan

Dalam kaitan dengan Pemilu Presiden 2019, teori kewarganegaraan baru ini menjadi sangat relevan. Warga negara perlu mendesak agar kedua calon presiden hadir untuk menjadikan pemilu sebagai festival gagasan, ide dan pemikiran ditunjukkan dan diperbandingkan. Mereka harus mampu menunjukkan pemahaman atas masalah yang dihadapi bangsa dan hadir dengan tawaran solusi yang kreatif dan orisinal.

Dengan demikian, kita bisa keluar dari jebakan banalitas wacana yang hari-hari ini memenuhi ruang publik kita, yang dipertontonkan oleh kedua belah kubu. Banalitas itu terangkum

dalam sebutan "cebonger" bagi para pendukung Joko Widodo dan "kampreter" bagi pendukung Prabowo Subianto yang keduanya merujuk pada nama binatang.

Bagi cebonger, semua yang dilakukan Jokowi adalah benar dan yang dilakukan Prabowo adalah salah. Sebaliknya, bagi kampreter, semua yang dilakukan Jokowi salah dan hanya Prabowo yang benar. Setiap hari kedua kelompok ini berlomba menunjukkan kesalahan dan kelemahan lawannya dan membenarkan kelompok sendiri.

Konsekuensi dari hal itu adalah isu trivial yang kita lihat hari-hari ini. Di satu sisi, misalnya, kubu Prabowo hadir dengan isu Ratna Sarumpaet yang konon diserang oleh orang-orang tak dikenal yang bertujuan politis. Belakangan saat terbongkar bahwa itu kebohongan, para pendukung Jokowi terus mengeksploitasi isu itu untuk menunjukkan kebodohan para kampreter. Pada saat yang sama, isu yang lebih substantif seperti pelemahan rupiah yang dapat mengancam perekonomian kurang mendapat perhatian.

Jika dicermati, isu-isu yang trivial itu banyak yang justru berasal dari elite. Mereka seakan sengaja menggiring pikiran publik pada isu dangkal agar kedua kubu sama-sama terhindar untuk bicara hal yang penting. Baik kubu petahana maupun oposisi sama-sama tak banyak bicara tentang isu-isu substansial.

Mereka, misalnya, sama-sama tidak hadir dengan gagasan yang solid terhadap isu pembunuhan massal 1965 yang merupakan salah satu sisi paling gelap dalam sejarah bangsa. Juga perusakan hutan dan sumber daya alam oleh korporasi, pelemahan KPK oleh para koruptor.

Dalam konteks ini, kita tak bisa mengharapakan elite rela mengalihkan topik kampanye pada hal-hal substansial tersebut. Masa-masa bergantung kepada elite sudah saatnya kita tinggalkan. Kita, warga negaralah yang harus mendesak mereka untuk bicara substansi. Di sinilah kewarganegaraan baru sebagai gerakan teoretik dan politik menemukan relevansinya. (40)

— **Wijayanto**, dosen Universitas Diponegoro, sedang merampungkan studi doctoral di Universitas Leiden, Belanda, peneliti di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Semarang.